

**EVALUASI KEBIJAKAN IZIN REKLAME DI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU KOTA
TANJUNGPINANG**

Oleh:

Michelle Isabella

NIM. 190563201037

ABSTRAK

Kebijakan izin reklame merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilatar belakangi untuk melihat bagaimana evaluasi kebijakan izin reklame yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 70 tahun 2021 tentang penyelenggara reklame dan tata cara izin reklame. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori William N Dunn (2003:429-499) dengan indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan izin dan sistem pemungutan pajak reklame, serta kendala-kendala dalam perizinan dan pemungutannya. Dalam hal ini dengan melihat perizinan, penataan dan pelaksanaan reklame yang belum berjalan maksimal sesuai dengan peraturan walikota no. 70 tahun 2021 tentang penyelenggara dan tata cara izin reklame, Penelitian ini mengangkat dua permasalahan: Pertama, bagaimana kebijakan perizinan reklame di Kota Tanjungpinang. Kedua, apa kendala dalam perizinan dan penataan reklame di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perizinan dan penataan reklame yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Tanjungpinang belum maksimal, hal ini berdasarkan hasil penelitian di lapangan, serta BPPRD khususnya telah mengatur dan memungut pajak reklame yang berpedoman pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan antara lain: proses penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan walikota, perizinan reklame yang masih diabaikan oleh sebagian wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, dan wajib pajak yang sulit untuk ditemukan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor antara lain: lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP, yang mengakibatkan masih banyaknya reklame tidak berizin di Kota Tanjungpinang

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Perizinan Reklame, Pajak.

**EVALUATION OF ADVERTISEMENT LICENSE POLICIES AT THE
INVESTMENT SERVICE AND ONE DOOR SERVICES IN
TANJUNGPINANG CITY**

**By:
Michelle Isabella
NIM. 190563201037**

ABSTRACT

The advertising permit policy is a problem that is still being faced by the City of Tanjungpinang. The background of this research is to see how the evaluation of the advertisement permit policy is carried out by the Investment and One-Stop Service Office of Tanjungpinang City based on Mayor Regulation Number 70 of 2021 concerning billboard organizers and procedures for advertisement permits. This study uses a descriptive method with a qualitative approach and uses the theory of William N Dunn (2003:429-499) with indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, accuracy. The purpose of this research is to describe and analyze the licensing policy and advertising tax collection system, as well as the constraints on licensing and collection. In this case, by looking at licensing, arrangement and implementation of advertisements that have not run optimally in accordance with the mayor's regulation no. 70 of 2021 regarding the organizers and procedures for advertising permits. This research raises two issues: First, what is the advertising licensing policy in Tanjungpinang City. Second, what are the obstacles in licensing and structuring billboards in Tanjungpinang City. This study resulted in the conclusion that the permitting and arrangement of billboards carried out by DPMPTSP of Tanjungpinang City was not maximized, this was based on the results of research in the field, even though the BPPRD in particular had regulated and collected advertisement tax based on regional regulation number 2 of 2011 concerning regional taxes. However, in its implementation there are still problems, including: the process of organizing billboards that are not in accordance with the mayor's regulations, advertisement permits that are still ignored by some taxpayers, the level of taxpayer awareness is still low, and taxpayers who are difficult to find. This happened due to several factors, including: weak supervision carried out by DPMPTSP, which resulted in many unlicensed billboards in Tanjungpinang City

Keywords: *Policy Evaluation, Advertising Licensing, Taxes*